

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH [vii]

DAFTAR ISI [ix]

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM [xii]

DAFTAR SINGKATAN [xiii]

ABSTRAK [xviii]

BAB 1

PENDAHULUAN [1]

- 1.1. Latar Belakang [2]
- 1.2. Tujuan dan Permasalahan [8]
- 1.3. Studi-studi Terdahulu: Pemetaan Ideologi dan Wacana Politik di Indonesia [9]
 - 1.3.1. Perbedaan Studi ini dengan Studi Sebelumnya [28]
- 1.4. Kerangka Teori: Analisis Ideologi dan Pendekatan-pendekatannya [31]
 - 1.4.1. Pendekatan Marxis (klasik): Ideologi sebagai Kesadaran Palsu [33]
 - 1.4.2. Pendekatan Non-Marxis: Ideologi sebagai Sosiologi Pengetahuan [40]
 - 1.4.3. Pendekatan Post-Marxis sebagai Alternatif: Ideologi sebagai Kontestasi Wacana [45]
 - Laclau-Mouffe: *Back to the Hegemonic Struggle* [50]
- 1.5. Metodologi: Analisis Wacana [57]
- 1.6. Kerangka Analisis [60]
- 1.7. Pengumpulan Data [62]
- 1.8. Struktur Disertasi [62]

BAB 2

DARI ERA PERGERAKAN SAMPAI KE SUKARNO DAN SOEHARTO [66]

- 2.1. Era Pergerakan: Islam, Marxisme, dan Nasionalisme sebagai Wacana Dominan [68]
 - 2.1.1. Islam [69]
 - Sarekat Islam [70]
 - Muhammadiyah [73]
 - Nahdlatul Ulama [75]
 - 2.1.2. Marxisme [79]
 - 2.1.3. Nasionalisme [82]
 - 2.1.4. Anti-kolonialisme sebagai “Political Frontier” [86]
- 2.2. Sukarno dan Proyek Hegemoni: Pancasila, Partai Pelopor, dan Nasakom [90]
 - 2.2.1. Nasionalisme, Islam, dan Marxisme [90]
 - 2.2.2. Merumuskan Pancasila sebagai Ideologi Negara [92]
 - 2.2.3. Sistem Multi-partai dan Kegagalan Partai Pelopor [95]
 - 2.2.4. Nasakom, G30S, dan Hancurnya Politik Kiri [99]
 - 2.2.5. Menantang Negara-negara Barat [109]



- 2.3. Orde Baru dan Proyek Hegemoni Politik Soeharto [112]
 - 2.3.1. Memberangus PKI dan Melenyapkan Sukarno [114]
 - 2.3.2. Mengendalikan Militer sebagai Kekuatan Politik Penting [117]
 - 2.3.3. Mengendalikan Kekuatan Islam dan Mahasiswa [118]
 - 2.3.4. Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat [122]
 - 2.3.5. Krisis Multidimensi dan Kejatuhan [126]
- 2.4. Kesimpulan [128]

BAB 3

“KEBEBASAN POLITIK” SEBAGAI PENANDA SENTRAL DEMOKRASI [133]

- 3.1. Terbangunnya “Kebebasan Politik” sebagai Penanda Sentral [136]
- 3.2. Garis Antagonisme Pro-Reformasi vs Pro-Status Quo [143]
- 3.3. Wacana Kelompok Reformis dan Posisi-posisi Subyek [153]
 - 3.3.1. Reformasi Total vs Gradual: Mahasiswa vs Elite Oposisi [153]
 - 3.3.2. Gerakan Politik Islam: Pancasila, Khilafah, dan “Islamisasi” Politik [161]
 - 3.3.3. Tuntutan Kesejahteraan Akar Rumput: Buruh, Tani, Masyarakat Adat [169]
 - 3.3.4. Militansi dan Stagnasi Gerakan Kiri: PRD dan Eksponen Lainnya [182]
 - 3.3.5. Teori “Transisi Demokrasi” dan Intelektual Liberal [193]
- 3.4. Wacana Pro-Status Quo dan Posisi-posisi Subyek [198]
- 3.5. Kesimpulan [200]

BAB 4

“PEMBERANTASAN KORUPSI”

SEBAGAI PENANDA SENTRAL DEMOKRASI [204]

- 4.1. Terbangunnya “Pemberantasan Korupsi” sebagai Penanda Sentral [207]
 - 4.1.1. Krisis Ekonomi dan Wacana *Good Governance* [209]
 - 4.1.2. Wacana “Good Governance” dan Peran Aktor-aktor Internasional [214]
 - 4.1.3. Peran Sentral Masyarakat Sipil: Posisi-posisi Subyek [226]
 - 4.1.4. Kelahiran KPK sebagai Amanat Reformasi [232]
- 4.2. Gerakan Pemberantasan Korupsi dan Perlawanan Balik: Batas-batas Antagonisme dan Posisi-posisi Subyek [236]
 - 4.2.1. DPR, Pemerintah, dan MK: Revisi UU KPK [237]
 - 4.2.2. Kasus “Cicak dan Buaya” Jilid I, II, dan III [249]
 - 4.2.3. Dana Asing sebagai Dalih Delegitimasi KPK dan Gerakan Anti-korupsi [258]
- 4.3. Kesimpulan [265]



BAB 5

“KESEJAHTERAAN” SEBAGAI PENANDA SENTRAL DEMOKRASI [269]

- 5.1. Kesejahteraan: Proyek Politik Sepanjang Masa [271]
- 5.2. Terbangunnya “Kesejahteraan” sebagai Penanda Sentral [273]
 - 5.2.1. Perdebatan tentang Amandemen Pasal 33 UUD 1945: “Ekonomi Rakyat versus Fundamentalisme Pasar” [273]
 - 5.2.2. Program-program Kesejahteraan dan Posisi-posisi Subyek [284]
 - 5.2.2.1. Kesejahteraan sebagai “Jaring Pengaman Sosial” dan “Program Bantuan Sosial” [287]
 - 5.2.2.2. Kesejahteraan sebagai “inovasi dan kreasi” versus dan “strategi elektoral” [294]
 - 5.2.2.3. Kesejahteraan sebagai bagian dari isu global untuk mendorong “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*) [300]
 - 5.2.2.4. Kesejahteraan sebagai Hak Rakyat dan Kewajiban Konstitusional Negara [307]
- 5.3. Kesimpulan [316]

BAB 6

PENUTUP [319]

- 6.1. Demokrasi: Proyek Hegemoni dan Dislokasi Penanda Sentral [321]
- 6.2. Mengosongkan Makna Demokrasi, Membangun Ontologi Alternatif [336]
- 6.3. Keterbatasan Studi dan Rekomendasi [352]

DAFTAR PUSTAKA [354]

BIODATA PENULIS [372]

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

TABEL

- Tabel 1.1. Peta Ideologi Politik dan Wacana Politik Indonesia, 1920-an–2004 [12]
Tabel 1.2. Pendekatan dan Tujuan Analisis Ideologi [35]
Tabel 2.1. Wacana Politik Dominan Era Pergerakan Kemerdekaan 1920-an sampai 1930-an [88]
Tabel 3.1. Artikulasi dan Aktor-aktor Politik Awal Reformasi [142]
Tabel 3.2. Artikulasi Politik Gerakan Mahasiswa Era Presiden BJ Habibie [157]
Tabel 3.3. Partai-partai Islam pada Pemilu 1955 dan Pasca-Orde Baru [163]
Tabel 3.4. Perolehan Suara Partai Islam dan Nasionalis pada Pemilu Era Reformasi [168]
Tabel 3.5. Organisasi Gerakan-gerakan Kiri di Indonesia [190]
Tabel 5.1. Perbedaan antara MDGs dan SDGs [304]

DIAGRAM

- Diagram 1.1. Partai Politik dan Aliran Pemikiran Politik di Indonesia (Feith-Castles) [15]
Diagram 1.2. Tipologi Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru (Dhakidae) [23]
Diagram 1.3. Kerangka Analisis [61]
Diagram 3.1. Posisi-posisi Subyek Utama dan Artikulasi Politik Awal Reformasi [145]